

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik

M. Faqihudin

Staf Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasakti Tegal

E-mail: m.faqihudin20@yahoo.com

ABSRTACT

The purpose of this research is to: analyze financial performance Tegal local government in terms of the ratio of the area of financial independence, analyzing financial performance Tegal local government spending efficiency in terms of ratios, and analyze the financial performance of local governments in terms of Tegal, Tegal PAD effectiveness ratio.

The method used in this study is that research using secondary data archival research (archival research) where the data describing past events (historical). Because this study used secondary data from the data collection techniques used is to use a search technique records or documents.

Analysis of Variance calculation results Expenditure 2006 to 2010 showed a positive figure, the difference / variance approach the same from year to year . This means that local governments have taken advantage of Tegal is well on budget expenditures that have been made by the Government of Tegal is smaller than the planned budget.

Analysis of the calculation results Spending Growth 2006 to 2010 was positive, although when viewed from up and down and the percentage experiencing considerable growth decline in 2010. In general, the City Government has effort Tegal Expenditure utilization in the budget is always positive growth. Efficiency Analysis of the results of calculations Expenditure Tegal from 2006 to 2010 is less than 100 per cent where the smaller the ratio, the more efficient spending, and vice versa. Budgets will be efficient if the ratio is less than 100 and vice versa.

Keywords: *Variance Results Expenditure, Spending Growth, Effectiveness Financing.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Di sisi lain, masih terdapat pula ketimpangan sosial-ekonomi akibat dari terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang rendah (miskin). Seiring perkembangan waktu, potensi meningkatnya kesenjangan hingga saat inipun masih relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat – sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan analisis ekonom wilayah dalam perencanaan pembangunan kedepan juga menyangkut

berbagai dimensi pengukuran yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator – indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan. Indikator – indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena – fenomena daerah dan dinamika daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka diharapkan pemerintah kabupaten / kota termasuk Pemerintah Kota Tegal dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan di daerahnya. Pemberlakuan undang – undang tersebut memiliki konsekuensi pada pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Besaran dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung melemah, yang berakibat kepada

wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai (Mediaty, 2010).

Kecenderungan yang terjadi pada perencanaan anggaran di Kabupaten /Kota terkait dengan partisipasi masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana alokasi yang menyangkut kepentingan masyarakat pada APBD masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan maupun alokasi anggaran ditengarai belum dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan proporsi bagi pengeluaran aparatur yang melebihi pengeluaran publik dengan presentase yang tidak seimbang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal. Perlu dilakukan penelitian lebih dalam apakah ketimpangan proporsi tersebut telah sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat atau belum. (Wahyu Dyah Widowati, 2007). Untuk Kota Tegal sendiri dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa besaran belanja untuk pegawai menyerap rata – rata 43,85 % dari realisasi belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperlukan kajian untuk menganalisis kinerja APBD Kota Tegal setelah Pemerintah Kota Tegal melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2006 - 2010 dengan menggunakan rasio – rasio pengukuran kinerja APBD.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut diatas, disebutkan bahwa untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat (layanan publik) dari kinerja APBD yaitu analisis kinerja belanja yang meliputi : analisis varians belanja, analisis pertumbuhan biaya, analisis efisiensi belanja, analisis pembiayaan dan analisis

keserasian belanja. Oleh karena itu masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis varians belanja ?
- b. Bagaimana kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja ?
- c. Bagaimana kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis efisiensi belanja ?
- d. Bagaimana kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis pembiayaan?
- e. Bagaimana kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis keserasian belanja?

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis varians belanja.
- 2). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja.
- 3). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis efisiensi belanja.
- 4). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis pembiayaan.
- 5). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis keserasian belanja.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio – rasio untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD (kinerja APBD). Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Tegal sehingga dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan penyusunan APBD.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja APBD

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “*Net Profit*”.Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan

sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- d. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- e. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
- f. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. (Mardiasmo, 2002)

2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan efisiensi belanja. Dalam hal belanja daerah penting juga

dianalisis keserasian belanja karena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.

Berdasarkan informasi dari laporan Realisasi Anggaran Belanja, dapat dianalisis kinerja belanja dengan beberapa analisis berikut ini : (Abdul Halim, 2011)

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung varians belanja antara anggaran belanja dan relisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau prosentasenya. Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, jika sebaliknya maka mengindikasikan kinerja yang kurang baik.

b. Analisis pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanjamemiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah relatif lebih efisien jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah

melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat digunakan untuk mengetahui pola anggaran pemerintah daerah. Juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen analisis pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

e. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka porsi untuk ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja meliputi:

- 1). Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total belanja
- 2). Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
- 3). Rasio belanja Modal terhadap Total Belanja
- 4). Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja.

Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan, maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi NTT tentang efisiensi dan efektifitas pengeluaran (belanja) pemerintah pengaruhnya terhadap pembangunan di provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang bagus dan proses implementasi (kinerja) dari APBD itu sendiri.

Penelitian Mohammad Adim (2008) di Kabupaten Solongan dan penelitian Eka Rosalina di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis yang sama menunjukkan hasil, bahwa dengan menggunakan rasio – rasio tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dan efektifitas pemanfaatan (kinerja) APBD dan terdapat pertumbuhan belanja yang cenderung positif dengan SILPA bersaldo positif pula.

Selanjutnya Mediaty (2010) meneliti di Kabupaten Maros menggunakan rasio proporsi dan selanjutnya digunakan untuk melihat komponen belanja rutin dan total biaya. Sedangkan rasio efisiensi yang digunakan untuk melihat perbandingan antara belanja layanan publik dan realisasi penerimaan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa selama tahun 2003 – 2008 menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan APBD.

C. METODE PENELITIAN

1. Gambaran Data

Data dalam penelitian ini meliputi data keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010 yaitu total penerimaan

daerah, belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang merupakan data sekunder.

Sedangkan tipe data sekunder yang digunakan adalah data sekunder eksternal, yaitu data yang disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Tipe data sekunder eksternal bersarkan penerbitannya, antara lain berupa : indeks atau pedoman referensi, data sensus, data statistik, data pasar, data industri, direktori perusahaan, data investasi (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002 : 150). Sehingga data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder eksternal yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bappeda Kota Tegal dan dinas terkait,

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip (*archivalresearch*) dimana datanya menggambarkan kejadian masa lalu (historis). Karena penelitian ini menggunakan data sekunder maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik penelusuran arsip atau dokumen (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002 : 147).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pemerintah daerah adalah : (Abdul Halim, 2011)

a. Analisis Varians Belanja.

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, yaitu :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja.

Pertumbuhan belanja merupakan penambahan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Belanja Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

c. Analisis Efisiensi Belanja.

Analisis Efisiensi diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

d. Analisis Pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara SILPA dari tahun ketahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran.

e. Analisis Keserasian Belanja.

Untuk menganalisis keserasian belanja digunakan rasio – rasio :

i. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

ii. *Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja*

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

f. **Rakapitulasi Analisis Belanja**

No.	Analisis Belanja	Ukuran	Kriteria
1	Varians Belanja	Realisasi Belanja < Anggaran	Baik
2	Pertumbuhan Belanja	Positif	Baik
3	Efisiensi Belanja	Rasio efisiensi < 100%	Baik
4	Pembiayaan	Semakin kecil SILPA	Baik
5	Keserasian Belanja	Semakin besar % untuk ekonomi masyarakat	Baik

D. ANALISIS DATADAN PEMBAHASAN

1. Analisis Varian Belanja

Analisis Varian Belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Kota Tegal. Analisis Varian Belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka Pemerintah Kota Tegal khususnya dan Pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja dan Realisasinya tersebut di atas, maka dapat dihitung Varian Belanja 5 berikut ini

Tabel 1 : Varian Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2006 – 2010

Belanja Daerah	Tahun Anggaran				
	2006	2007	2008	2009	2010
Anggaran Belanja	319.528.493.000	379.319.376.000	432.677.015.000	492.467.350.000	524.656.020.000
Realisasi Belanja	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Varian Belanja	27.713.337.000	45.737.630.000	39.476.971.000	33.846.470.119	50.298.331.000

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Varian Belanja menunjukkan angka yang positif, dengan selisih / varian yang mendekati sama dari tahun ke tahun.. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Tegal telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan dilihat dari Analisis Varian Belanja Pemerintah Kota Tegal telah memanfaatkan APBD dengan baik

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja digunakan untuk mengetahui pertambahan belanja yang dialokasikan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja yang selalu positif dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja dalam APBD semakin baik. Pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Tegal selama tahun 2006 sampai dengan 2010 tertuang dalam tabel 6 berikut ini.

**Tabel 2 : Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Tegal Tahun 2006 –
2010 (Dalam Rupiah)**

Belanja Daerah	Tahun Anggaran				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Belanja	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Pertumbuhan		41.769.590.000	59.618.298.000	65.520.835.881	15.739.807.119
Keterangan		Positif 14,08 %	Positif 17,72%	Positif 16,66%	Positif 3,43%

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Pertumbuhan Belanja adalah positif, meskipun kalau ditinjau dari prosentase mengalami naik turun dan penurunan pertumbuhan cukup besar pada tahun 2010. Secara umum Pemerintah Kota Tegal telah mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD selalu mengalami pertumbuhan yang positif.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran / belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Berkaitan dengan data – data tersebut sebagaimana telah disajikan pada tabel tersebut diatas, maka rasio efisiensi belanja Kota Tegal tahun 2006 – 2010 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 : Rasio Efisiensi Belanja Kota Tegal Tahun 2006 – 2010

Belanja	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Anggaran	319.528.493.000	379.319.376.000	432.677.015.000	492.467.350.000	524.656.020.000
Rasio Efisiensi Belanja (%)	91,33	87,94	90,88	93,13	90,41

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pemerintah Kota Tegal telah melakukan efisiensi belanja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanjaja mulai tahun 2006 sampai tahun 2010 kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 dan sebaliknya.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) dari tahun ketahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran. SILPA Kota tegal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4 : Perbandingan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Kota Tegal 2006 - 2010 (Dalam Rupiah)**

Tahun	SILPA	Naik / Turun
2006	200.234.227.000	--
2007	193.911.563.000	Turun
2008	201.463.967.000	Naik
2009	49.998.822.000	Turun
2010	85.562.488.000	Naik

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa SILPA Kota Tegal ada kecenderungan terjadi penurunan meskipun secara jumlah ada kenaikan dan penurunan. Kecenderungan penurunan SILPA ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Tegal telah tepat dalam penyajian APBD.

5. Analisis Kecerassian Belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerahnya. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain – lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukan ke arah itu. Kecerassian belanja Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dari berapa besar prosentase yang digunakan untuk belanja operasi dibandingkan dengan keseluruhan belanja yang dilakukan dan berapa besar prosentase yang digunakan untuk belanja modal dibandingkan dengan keseluruhan belanja yang dilakukan.

Rasio – rasio tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 : Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Tegal Tahun 2006 – 2010

Belanja	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Belanja Operasi	219.370.022.000	247.792.240.000	299.044.921.000	335.934.421.446	408.191.365.000
Realisasi Total Belanja	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Rasio Belanja Operasi dan Total Belanja (%)	<i>75,18 %</i>	<i>74,43%</i>	<i>76,05%</i>	<i>73,32%</i>	<i>86,05%</i>
Realisasi Belanja Modal	72.387.548.000	85.665.206.000	94.155.123.000	122.611.458.480	66.120.122.000
Realisasi Total Belanja	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Rasio Belanja Modal dan Total Belanja (%)	<i>24,81%</i>	<i>25,68%</i>	<i>23,95%</i>	<i>26,74%</i>	<i>13,94%</i>

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Dari tabel 5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Tegal dalam mengalokasikan belanjanya memiliki kecenderungan prosentase yang cukup besar belanja yang digunakan untuk belanja operasi dimana selama tahun 2006 sampai dengan tahun rata-rata belanja operasi mencapai 77,01 % dari keseluruhan belanja, sedangkan untuk belanja modal Pemerintah Kota Tegal hanya mengalokasikan belanja modal rata – rata selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 hanya 23,02%.

Belanja operasi dengan alokasi sebesar rata – rata 77,01 % digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Dari komponen belanja operasi belanja pegawai menyerap APBD yang besar. Tabel 6 berikut

menggambarkan besarnya prosentase belanja pegawai dari keseluruhan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal

Tabel 6 : Prosentase Belanja Pegawai Kota Tegal Tahun 2006-2010

Belanja	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Belanja Pegawai	126.374.360.000	163.127.263.000	208.683.874.000	210.482.163.186	258.564.900.000
Realisasi Total Belanja	291.812.156.000	333.581.746.000	393.200.044.000	458.620.879.881	474.360.687.000
Rasio Belanja Pegawai dan Total Belanja (%)	43,33%	48,90%	53,07%	45,90	54,51%

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah

Dari tabel 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa prosentase belanja pegawai rata – rata mencapai 49,14 %. Jumlah ini jauh lebih besar dari prosentase yang digunakan untuk biaya modal yang hanya rata – rata 23,02 % dari total belanja Pemerintah Kota Tegal. Belanja modal tersebut digunakan untuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Berdasarkan analisis keserasian belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tegal dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar persentasenya pada belanja operasi sedangkan untuk penopang pelayanan publik dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari kelima analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal menunjukkan hasil yang positif.
- b. Bila ditinjau dari analisis keserasian belanja, Pemerintah Kota Tegal masih memberikan porsi yang besar untuk belanja operasi dibandingkan dengan porsi untuk belanja modal. Porsi belanja pegawai juga cukup besar dibandingkan dengan belanja modal. Sehingga Pemerintah Kota Tegal dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsinya pada belanja operasi sedangkan untuk penopang pelayanan publik dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah.

2. Rekomendasi

Mengacu dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Varians belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan pembiayaan yang sudah bagus agar terus ditingkatkan rasionya, dilain pihak Pemerintah Kota Tegal juga harus terus meningkatkan PAD nya dengan mencari dan menggali sumber – sumber PAD yang potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk

membayar pajak, retribusi dan lain – lain. Perlu diperhatikan bahwa dalam menggali PAD harus pula memperhatikan asas adil dan mafaatnya bagi masyarakat.

- b. Agar asas adil dan manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah Kota Tegal lebih memperhatikan keserasian belanja antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja yang lebih menyentuh pada pelayanan publik dan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan.

F. REFERENSI

- Adhim, Mohammad. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun*. Jambi: Universitas Negeri Jambi
- Badan Pusat Statistik Kota Tegal. *Kota Tegal Dalam Angka (2005 – 2010)*
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantono.Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2007. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Marizka, Addina. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan*. Medan : FE USU
- Mediaty. 2010. “ Analisa Efisiensi APBD Kabupaten Maros Tahun 2003 – 2008.” *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. 9 No. 2 Maret 2010, pp 253 – 263.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)*: Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Todaro, Micheal P. 2000. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Republik Indonesia. *Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah*

----- . *Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

----- . *Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

----- . *Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.